



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jl. A. Yani No. 90 Telp/Fax 0719 - 23831  
**TANJUNGPANDAN**

---

**DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**(RENJA-P) TAHUN 2024**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KABUPATEN BELITUNG**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KABUPATEN BELITUNG**  
**TANJUNGPANDAN**  
**2024**

---

## KATA PENGANTAR

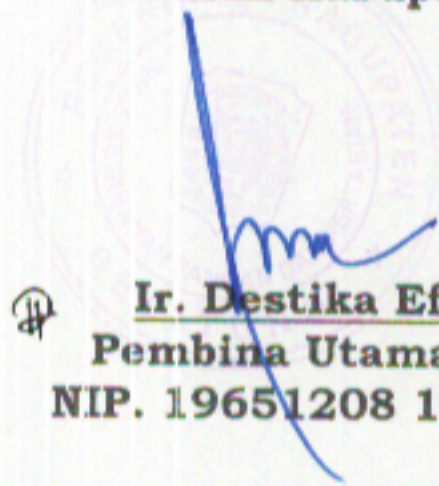
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini merupakan suatu dokumen rencana pelaksanaan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 sehingga dapat terarah dan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini dapat bermanfaat sebagai peningkatan kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Juli 2024

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Pertanian Kabupaten Belitung**



**Ir. Destika Efenly, MM**  
**Pembina Utama Muda/IVc**  
**NIP. 19651208 199203 1 005**

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 4  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 6  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 7  |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN<br/>TRIWULAN II TAHUN 2024</b> ..... | 8  |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT<br/>DAERAH</b> .....                   | 18 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | 26 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

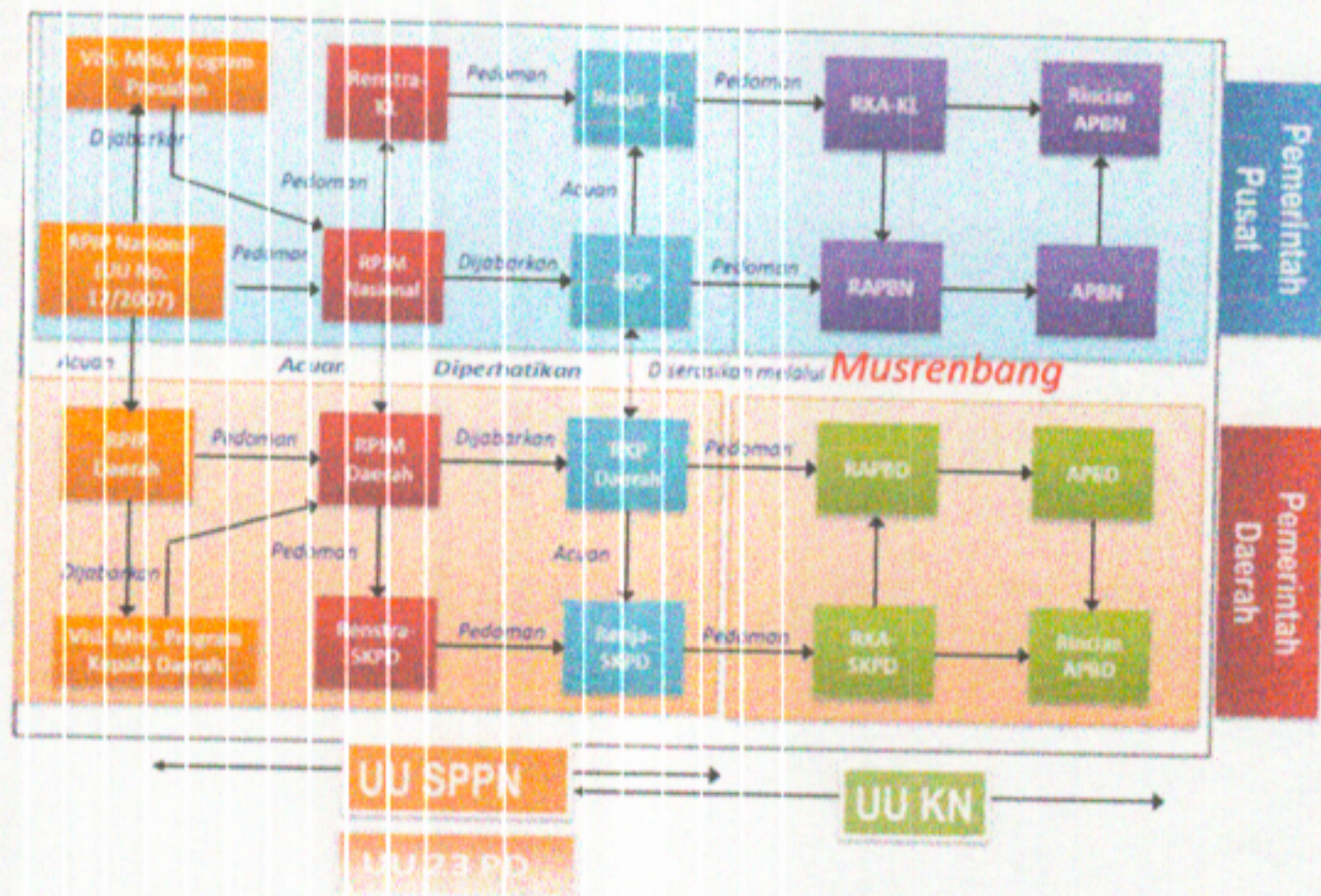
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan rancangan akhir,
6. Penetapan.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran

keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat daerah menerima surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
2. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD.
3. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
4. Verifikasi oleh Bappeda yang bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
5. Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
6. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA.
7. Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita

- Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54)
  16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
  17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan Pembibitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
  18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 85);
  19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 8).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan perubahan untuk periode sisa tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja perubahan ini adalah untuk:

1. Menselaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2024.

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2024.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam upaya melaksanakan Pelayanan Publik.
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024 menggambarkan sejumlah target kinerja kegiatan/program yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DKPP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024 mengacu pada pencapaian indikator yang tertuang dalam Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026. Pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung tahun 2024 terdapat 10 Program, 24 Kegiatan dan 45 sub-Kegiatan dengan indikator sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Th. 2021 pada yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang tertuang di dalam Renstra-PD tahun ke-1. Pencapaian kinerja pelayanan DKPP sampai dengan triwulan II Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:







| No  | Kategori | Lokasi     | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target RPJMD pada Tahun 2025 (Mula periode RPJMD) |    |    |    | Monev Capaian Kinerja RPJMD | Kondisi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    | Monev Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024 yang direalisasi | Monev Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024 (Mula Periode RPJMD) | Monev Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024 (akhir tahun) | Monev Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024 (akhir tahun) | Monev Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024 (akhir tahun) |    |    |    |    |
|-----|----------|------------|---|------------------------------------|---|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|----|-----|----|---|---|--|--|--|----|----|----|----|
|     |          |            |   |                                    | K   | A  | M  | D  |                             | I                             | II | III | IV |   |   |  |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1.1 | 1.1.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 1.2 | 1.2.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 1.3 | 1.3.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 1.4 | 1.4.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 1.5 | 1.5.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 2   | 2.1      | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 2.2 | 2.2.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 2.3 | 2.3.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 2.4 | 2.4.1    | 27 01 2020 | Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)    | Kualitas Pelayanan Publik (KPP)                   | 1  | 2  | 3  | 4                           | 5                             | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14 |    |    |    |
| 15  |          |            |   |                                    |   | 16 | 17 | 18 | 19                          | 20                            | 21 | 22  | 23 | 24  | 25  | 26   | 27   | 28   | 29 | 30 | 31 |    |
| 32  |          |            |   |                                    |   | 33 | 34 | 35 | 36                          | 37                            | 38 | 39  | 40 | 41  | 42  | 43   | 44   | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50  |          |            |   |                                    |   | 51 | 52 | 53 | 54                          | 55                            | 56 | 57  | 58 | 59  | 60  | 61   | 62   | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68  |          |            |   |                                    |   | 69 | 70 | 71 | 72                          | 73                            | 74 | 75  | 76 | 77  | 78  | 79   | 80   | 81   | 82 | 83 | 84 | 85 |



| No.   | Sumber | Kode            | Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program / Kegiatan  | Tingkat RPJMD pada Tahun 2024 (sila periode RPJMD) |    |      |          | Realisasi Kinerja pada Triwulanan |    |      |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang di erahkan (Tahun 2024) |    |      |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 |    |      |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 94 tahun 2024 (akhir tahun) |    |      |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 94 tahun 2024 (akhir tahun) |    |      |          |
|-------|--------|-----------------|--|---|--|----|------|----------|-----------------------------------|----|------|----------|---|----|------|----------|---|----|------|----------|--|----|------|----------|--|----|------|----------|
|       |        |                 |  |   | K  | Rp | %    | RP (Mdi) | K                                 | Rp | %    | RP (Mdi) | K   | Rp | %    | RP (Mdi) | K   | Rp | %    | RP (Mdi) | K  | Rp | %    | RP (Mdi) | K  | Rp | %    | RP (Mdi) |
| 5     |        | 3 27 02         | Program Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat | Privatisasi (N) dan pengabdian masyarakat   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100                               | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   |
| 5.1   |        | 3 27 02 400     | Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat         | Subsidi   | 20   | Rp | 100% | 100,00   | 20                                | Rp | 100% | 100,00   | 20  | Rp | 100% | 100,00   | 20  | Rp | 100% | 100,00   | 20   | Rp | 100% | 100,00   | 20   | Rp | 100% | 100,00   |
| 5.1.1 |        | 3 27 02 400 000 | Subsidi                                      | Subsidi   | 20   | Rp | 100% | 100,00   | 20                                | Rp | 100% | 100,00   | 20  | Rp | 100% | 100,00   | 20  | Rp | 100% | 100,00   | 20   | Rp | 100% | 100,00   | 20   | Rp | 100% | 100,00   |
| 6     |        | 3 27 06         | Program Pendidikan dan Pelatihan             | Penerapan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100                               | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   |
| 6.1   |        | 3 27 06 200     | Pendidikan dan Pelatihan                     | Pendidikan dan Pelatihan  | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100                               | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   |
| 6.1.1 |        | 3 27 06 200 000 | Pendidikan dan Pelatihan                     | Pendidikan dan Pelatihan  | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100                               | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   |
| 7     |        | 3 27 07         | Program Penelitian dan Pengembangan          | Penelitian dan Pengembangan   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100                               | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   |
| 7.1   |        | 3 27 07 200     | Penelitian dan Pengembangan                  | Penelitian dan Pengembangan   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100                               | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   |
| 7.1.1 |        | 3 27 07 200 000 | Penelitian dan Pengembangan                  | Penelitian dan Pengembangan   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100                               | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100   | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   | 100  | Rp | 100% | 100,00   |



Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan II didapat dihasil pencapaian kinerja masing-masing program, yaitu:

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat realisasi kinerja program masih belum bisa dilihat dikarenakan Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang merupakan indikator programnya baru akan dihitung pada akhir tahun.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan juga belum bisa dilihat hasil kinerjanya karena indikator kinerja dari program ini, Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan, baru pada tahap pengumpulan data dan akan dihitung di akhir tahun anggaran.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan yang indikator kinerjanya Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan sudah mencapai target kinerja 100%, dibuktikan dengan hasil pengujian sampel yang sudah dilakukan sebanyak delapan kali sampai dengan Triwulan II dengan total sampel sebanyak 25 sampel didapat hasil 100% aman.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh realisasi kinerja Program sebesar 37,5%, yang merupakan rata-rata dari 4 indikator kinerja program; “Persentase dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan” dengan capaian kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), “Indeks Professional ASN Perangkat Daerah” dengan realisasi 0% (nol persen), “Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah” dengan realisasi 50% (lima puluh persen), dan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur” dengan capaian kinerja 50% (lima puluh persen). Penyebab rendahnya capaian kinerja program ini yaitu salah satu indikatornya, Indeks Professionalitas ASN Perangkat Daerah masih 0% (nol persen) karena baru akan dihitung di akhir tahun anggaran.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian realisasi kinerjanya masih 0% (nol persen) dari target sebesar 14% (empat belas persen). Indikator program ini yaitu Persentase (%)

kebutuhan sarana pertanian yang disediakan belum ada yang terpenuhi dari target sebanyak 6 jenis (saprodi pangan 1 jenis, saprodi horti 3 jenis, saprodi perkebunan 1 jenis dan alsintan 1 jenis).

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, capaian kinerjanya masih 33,82% (tiga puluh tiga koma delapan dua persen) karena indikator kinerjanya Persentase (%) prasarana pertanian yang digunakan 11,72% (sebelas koma tujuh dua persen) dan Persentase (%) prasarana pertanian dalam kondisi baik tercapai 84,76% (delapan puluh empat koma tujuh enam persen). Persentase (%) prasarana pertanian yang digunakan mencapai 11,72% dihitung dari 119 hektar sawah yang sudah ditanami dari total sawah yang ada seluas 1.015,39 hektar. Untuk indikator persentase (%) prasarana dalam kondisi baik terhitung sebanyak 96 unit dari total 136 unit sampai dengan triwulan II.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sudah mencapai target kinerja 100% dengan indikator Persentase (%) penanganan penemuan kasus penyakit hewan menular, dibuktikan dengan sudah ditanganinya semua kasus penyakit hewan menular yang ditemukan.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sudah sudah mencapai 100% karena dari 254 hektar lahan pertanian yang dikelola, semuanya sudah mendapat perlakuan pengendalian OPT.
- Program Perizinan Usaha Pertanian sudah terealisasi 14,28% (empat belas koma dua delapan persen) dari target kinerja 100% (seratus persen) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Program Penyuluh Pertanian capaian realisasi programnya sudah mencapai 11% (sebelas persen) dimana indikator programnya "Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani Madya" dimana ada 4 (empat) kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas kelembagaan sampai dengan Triwulan II.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja dan keuangan DKPP sampai dengan Triwulan II masih dikategorikan sangat rendah, dimana rata-rata capaian kinerja sub-kegiatan sebesar

30,85% (tiga puluh koma delapan lima persen) dan rata-rata realisasi fisik keuangan hanya sebesar 25,56% (dua puluh lima koma lima enam persen).

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2024 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan pendekatan perencanaan baik partisipatif, *topdown* dan *bottom-up*. Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian seluruh urusan wajib non pelayanan dasar dan pilihan yang disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada Review Perubahan Ketiga Renstra PD Tahun 2024-2026, setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana APBD Kabupaten Belitung. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan perubahan kebutuhan dana pada tahun 2024.

Adapun program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari 9 Program, 22 Kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan, dengan nomenklatur sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan;
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis;
    - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
  - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan;
    - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
    - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan;
      - Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
    - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.
  3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
    - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
      - Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
  4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah.
    - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
    - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
    - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
      - Pengadaan Mebel;
      - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
    - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Alat Besar;
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
    - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan;
      - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
    - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
      - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
    - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
      - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.
    - d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:
      - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota.
  6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
    - a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan;
      - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan

- Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan;
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
- a. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan;
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan.
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
9. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian.
10. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
  - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (RKPD-P) Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

TABEL 2. PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (REKJA OPD) TAHUN 2024  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG


| Kode            | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan-Sub Kegiatan | Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan |         |                     |     |           |             |        | Kelompok Sasaran |             |  |  |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|---------|---------------------|-----|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|--|--|
|                 |  |   | Target 2024                          |         | Pagu Indikatif (Rp) |     | RKPD 2024 | RKPD P 2024 | Lokasi |                  | Sumber Dana |  |  |
|                 |  |   | Sebelum                              | Setelah | (6)                 | (7) |           |             |        |                  |             |  |  |
| (1)             | (2)  | (3)   | (4)                                  | (5)     | (6)                 | (7) | (8)       | (9)         | (10)   |                  |             |  |  |
| 2               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan              |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09            | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03         | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.01      | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.01.0014 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.01.0016 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.02      | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.02.0004 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.02.0005 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.04      | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.04.0001 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.03.04.0002 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.04         | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.04.01      | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.04.01.0001 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.04.02      | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.04.02.0003 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.05         | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.05.01      | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 2.09.05.01.0007 | Wajib Nias Pelayanan Dasar   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 3               | Urusan/Bidang Urusan   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |
| 3.27            | Urusan/Bidang Urusan   |   |                                      |         |                     |     |           |             |        |                  |             |  |  |



| Kode              | Urusan/Didang Urusan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Target 2024 |             |               |               | Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan |               |                |      | Kategori Sasaran |
|-------------------|--|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------|------------------|
|                   |  |   | Sebelum     | Setelah     | RKPD 2024     | APBD 2024     | RKPD-P 2024                          | Lokasi        | Sumber Dana    |      |                  |
|                   |  |   |             |             |               |               |                                      |               |                | (4)  |                  |
| 3 27 01 2.09 0002 | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Keluaran : Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dilaksanakan Pajak dan Perawatannya   | 51 unit     | 51 unit     | 96.000.000    | 96.000.000    | 96.000.000                           | Tanjungpandan | APBD Kabupaten | (12) |                  |
| 3 27 01 2.09 0003 | 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Besar                             | Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dilaksanakan Perawatannya  | 1 unit      | 1 unit      | 137.500.000   | 137.500.000   | 137.500.000                          | Tanjungpandan | APBD Kabupaten |      |                  |
| 3 27 01 2.09 0006 | 4. Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya  | Keluaran : Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 70 unit     | 70 unit     | 44.140.000    | 44.140.000    | 44.140.000                           | Tanjungpandan | APBD Kabupaten |      |                  |
| 3 27 01 2.09 0007 | 5. Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya  | Keluaran : Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 6 unit      | 6 unit      | 44.900.000    | 44.900.000    | 44.900.000                           | Tanjungpandan | APBD Kabupaten |      |                  |
| 3 27 02 2.01      | 2. Program   | Program Propaganda dan Promosi/Informasi Sistem Pertanian   | 14,00 %     | 14,00 %     | 1.354.024.450 | 2.284.518.450 | 3.287.529.450                        |               |                |      |                  |
| 3 27 02 2.01      | 1. Kegiatan  | Pengawasan Kegiatan Usaha Pertanian   | 6 jenis     | 6 jenis     | 479.300.500   | 610.900.500   | 610.900.500                          |               |                |      |                  |
| 3 27 02 2.01 0001 | Sub Kegiatan   | 1. Pengawasan Sistem Pemeliharaan Perikanan   | 30,81 %     | 30,81 %     |               |               |                                      |               |                |      |                  |
| 3 27 02 2.01 0001 | 1. Kegiatan  | 1. Pengawasan Sistem Pemeliharaan Perikanan   | 4 laporan   | 4 laporan   | 479.300.500   | 610.900.500   | 610.900.500                          |               |                |      |                  |
| 3 27 02 2.02      | 2. Kegiatan  | 2. Pengawasan Sistem Perikanan (SOP) Hewan, Tumbuhan dan Monev/evaluasi Kemandirian Kabupaten Kota  | 0,00 %      | 0,00 %      | 270.420.500   | 550.400.500   | 550.400.500                          |               |                |      |                  |
| 3 27 02 2.02 0003 | Sub Kegiatan   | 1. Pemantauan SDG Jawa/Provinsi   | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 530.480.500   | 530.480.500   | 530.480.500                          |               |                |      |                  |
| 3 27 02 2.02 0003 | 1. Kegiatan  | 1. Pemantauan SDG Jawa/Provinsi   | 94 ekor     | 94 ekor     | 151.835.800   | 151.835.800   | 151.835.800                          |               |                |      |                  |
| 3 27 02 2.03 0001 | Sub Kegiatan   | 1. Pengawasan Mutu dan Perilaku Pemeliharaan Ternak dan Tumbuhan Paksi/Tikus/Tampani Stalk Kacil  | 1 laporan   | 1 laporan   | 151.835.800   | 151.835.800   | 151.835.800                          |               |                |      |                  |
| 3 27 2 2.06       | 4. Kegiatan  | 4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Paksi Ternak yang Sembunyi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota Lain   | 1.500 ekor  | 1.500 ekor  | 193.286.850   | 911.286.850   | 911.286.850                          |               |                |      |                  |
| 3 27 2 2.06 0003  | Sub Kegiatan   | 1. Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sembunyi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota Lain  | 1.500 ekor  | 1.500 ekor  | 193.286.850   | 911.286.850   | 911.286.850                          |               |                |      |                  |
| 3 27 03           | 3. Program   | 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prosesus Pertanian   | 23,64 %     | 23,64 %     | 236.169.300   | 236.169.300   | 236.169.300                          |               |                |      |                  |
| 3 27 03 2.01      | 1. Kegiatan  | 1. Pengembangan Prosesus Pertanian  | 23,64 %     | 23,64 %     | 203.202.300   | 203.202.300   | 203.202.300                          |               |                |      |                  |
| 3 27 03 2.01 0015 | Sub Kegiatan   | 1. Fasilitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LC2PB di Kabupaten Kota | 136 unit    | 136 unit    | 203.202.300   | 203.202.300   | 203.202.300                          |               |                |      |                  |
| 3 27 03 2.01 0015 | 1. Kegiatan  | 1. Fasilitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LC2PB di Kabupaten Kota | 23,64 %     | 23,64 %     | 161.732.300   | 161.732.300   | 161.732.300                          |               |                |      |                  |
| 3 27 03 2.01 0016 | 2. Kegiatan  | 2. Penyediaan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kota   | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 41.470.000    | 41.470.000    | 41.470.000                           |               |                |      |                  |
| 3 27 03 2.02      | 2. Kegiatan  | 2. Pengembangan Prilaku Pertanian   | 33,64 %     | 33,64 %     | 33.106.000    | 33.106.000    | 33.106.000                           |               |                |      |                  |
| 3 27 03 2.02 0015 | Sub Kegiatan   | 1. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan  | 6 unit      | 6 unit      | 33.106.000    | 33.106.000    | 33.106.000                           |               |                |      |                  |
| 3 27 04 2.03      | 4. Program   | 4. Program Pengendalian Kualitas Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 100 %       | 100 %       | 85.193.000    | 85.193.000    | 85.193.000                           |               |                |      |                  |
| 3 27 04 2.03 0002 | 1. Kegiatan  | 1. Penyelidikan, Pengawasan dan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 1200 person | 1200 person | 85.193.000    | 85.193.000    | 85.193.000                           |               |                |      |                  |
| 3 27 04 2.03 0002 | Sub Kegiatan   | 1. Penyelidikan, Pengawasan dan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 4 laporan   | 4 laporan   | 85.193.000    | 85.193.000    | 85.193.000                           |               |                |      |                  |
| 3 27 04 2.05      | 2. Kegiatan  | 2. Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Tumbuhan dan Monev/evaluasi Kemandirian Kabupaten Kota  | 30 orang    | 30 orang    | 32.100.000    | 32.100.000    | 32.100.000                           |               |                |      |                  |
| 3 27 04 2.05 0006 | Sub Kegiatan   | 1. Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Tumbuhan dan Monev/evaluasi Kemandirian Kabupaten Kota  | 30 orang    | 30 orang    | 32.100.000    | 32.100.000    | 32.100.000                           |               |                |      |                  |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Capaian Kerja dan Kinerja Pendanaan |            |                       |                       | Kategori Sasaran                      |                       |      |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|
|                   |   |  | Target 2024                         |            | Fagu Indikator (Rp)   |                       |                                       |                       |      |
|                   |   |  | Selesai                             | Selesai    | RKPD 2024             | RKPD-P 2024           |                                       |                       |      |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)                                 | (5)        | (6)                   | (7)                   | (8)                                   | (9)                   | (10) |
| 3 27 04 2.05      | 2. Kegiatan<br>Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Tindakan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Koharian : SDM Baru Sembelih (Jualah) yang terampil<br>Hasil : Penyesuaian prosedur penyembelihan sesuai syarat  | 30 orang                            | 30 orang   | 32.100.000            | 32.100.000            | Tanjungpandan                         | APBD Kabupaten        | (12) |
| 3 27 04 2.05 0008 | Sub Kegiatan<br>1. Peningkatan Kualitas Masyarakat terhadap Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan       | Koharian : Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesehatan melalui komitei dan kepelatihan hewan<br>Hasil : Penyesuaian prosedur penyembelihan sesuai persyaratan  | 30 orang                            | 30 orang   | 32.100.000            | 32.100.000            | Tanjungpandan                         | APBD Kabupaten        |      |
| 3 27 05 2.01      | 5. Program<br>Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Tindakan Kesehatan              | Koharian : Fasilitas penyelenggaraan kesehatan pertanian<br>Hasil : Peningkatan penyelenggaraan kesehatan pertanian  | 100 %                               | 100 %      | 150.148.000           | 150.148.000           | Tanjungpandan                         | APBD Kabupaten        |      |
| 3 27 06 2.01      | 6. Program<br>Peningkatan Kualitas Usaha Pertanian  | Koharian : Jumlah Lulusan Sarjana Organisme Perikanan Tambahan (OFT) Taniama Pagar, Hama/ultra, dan Perikanan yang Dikerudahkan<br>Hasil : Persentase (%) analisis pertanian yang memiliki irigasi pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan   | 570 ha                              | 570 ha     | 150.148.000           | 150.148.000           | Tanjungpandan, Mambanga dan Uluh Sewa | APBD Kabupaten        |      |
| 3 27 06 2.01 0005 | Sub Kegiatan<br>1. Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha dan Jasa Usaha Pertanian        | Koharian : Pelatihan dan Pengembangan Peternak dan Usaha Perikanan<br>Hasil : Persentase (%) analisis pertanian yang memiliki irigasi pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan  | 100 %                               | 100 %      | 285.000.000           | 285.000.000           | Tanjungpandan, Mambanga dan Uluh Sewa | APBD Kabupaten        |      |
| 3 27 07 2.01      | 7. Program<br>Peningkatan Kualitas Perikanan  | Koharian : Fasilitas kesehatan kelengkapan ikan dan Usahawan Jasa Airman (UJJA)<br>Hasil : Peningkatan kualitas kesehatan kelengkapan ikan dan Usahawan Jasa Airman (UJJA)<br>Koharian : Penyediaan pertanian<br>Hasil : Peningkatan kualitas kesehatan kelengkapan ikan dan Usahawan Jasa Airman (UJJA) | 1 apoteker                          | 1 apoteker | 203.000.000           | 203.000.000           | Tanjungpandan, Mambanga dan Uluh Sewa | APBD Kabupaten        |      |
| 3 27 07 2.01 0001 | Sub Kegiatan<br>1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Kelengkapan Perikanan di Kecamatan dan Desa       | Koharian : Jumlah Kelengkapan Penyediaan Perikanan di Kecamatan dan Desa yang Disalurkan Kesehatan<br>Hasil : Jumlah Kelengkapan Perikanan di Kecamatan dan Desa yang Disalurkan Kesehatan   | 4 unit                              | 4 unit     | 307.217.000           | 307.217.000           | Tanjungpandan                         | APBD Kabupaten        |      |
| 3 27 07 2.01 0002 | Sub Kegiatan<br>2. Pengembangan Kualitas Kesehatan Perikanan di Kecamatan dan Desa                  | Koharian : Jumlah Kelengkapan Perikanan di Kecamatan dan Desa yang Disalurkan Kesehatan  | 15 unit                             | 15 unit    | 40.644.000            | 40.644.000            | Tanjungpandan                         | APBD Kabupaten        |      |
| <b>Jumlah</b>     |   |  |                                     |            | <b>28.721.966.344</b> | <b>28.721.966.344</b> |                                       | <b>21.884.716.344</b> |      |

Tanjungpandan, Juli 2024  
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
 Kabupaten Belitung

  
 Ir. DESTIKA EFENTLI, MM  
 Pemina Utama Mude/TV.c  
 NIP. 19651208 199203 1 005

## **BAB IV PENUTUP**

Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menerapkan mekanisme perencanaan *bottom up planning* dan *top down policy*. Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 merupakan hasil dari usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Kecamatan yang disinkronkan atau diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung maupun dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijakan Kementerian Pertanian. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa target indikator sasaran yang belum tercapai, oleh karena itu diharapkan untuk tahun-tahun ke depan perlu perhatian yang serius dari seluruh stakeholder terkait untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Belitung.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan pembangunan di Kabupaten Belitung tahun 2024 semester II sehingga arah, tujuan, sasaran serta strategi dalam mencapai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Belitung dapat berjalan dengan baik dan terencana.

Tanjungpandan, Juli 2024

Kepala Dinas,



Ir. Destika Efenly, MM  
Pembina Utama Muda/IVC  
NIP. 19651208 199203 1 005